



Judul : Publik Tagih Hasil Lawatan SBY
Tanggal : Sabtu, 09 Februari 2013
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

Publik Tagih Hasil Lawatan SBY

JAKARTA – Publikasi hasil lawatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke sejumlah negara pekan lalu tenggelam akibat kisruh Partai Demokrat. Presiden lebih banyak bicara mengenai partainya dibandingkan hasil lawatannya.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyuarakan isu-isu penting untuk kepentingan bilateral. Padahal dia harus memenuhi asas penggunaan anggaran berbasis kinerja,” kata anggota BAKN DPR Eva Kusuma Sundari di Jakarta kemarin. Eva juga menyesalkan de-sakan dari kader senior Demokrat yang kchetulnya juga pejabat higra untuk menggiring masalah partai ke Presiden. Desakan itulah, kata dia, yang kemudian membuat Presiden kehilangan kontrol pribadi sehingga dalam melaksanakan tugas negara terkontaminasi urusan partai. “Sebenarnya ini manusiawi, tetapi sepatutnya proporsi isu publik lebih besar dan tidak sebaliknya mendominasi tugas negara,” ungkapnya.

“Presiden terlihat kepiikan banget dengan isu Partai Demokrat. Presiden justru tidak

minasi tugas negara,” katanya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP itu mengatakan, seharusnya para staf khusus Presiden mengingatkan SBY agar tidak terlalu memasuki urusan partainya, apalagi mengeluarkan pernyataan yang merugikan diri Presiden dan mencederai kepercayaan publik.

Sebagaimana diketahui, Presiden melakukan lawatan ke luar negeri selama delapan hari. Presiden melakukan kunjungan kenegaraan untuk mempererat kerja sama bilateral. Di antaranya Liberia, Nigeria, Arab Saudi, dan Mesir.

Menurut Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Uchok Sky Khadafi, hasil lawatan ke luar negeri tersebut seharusnya disampaikan ke publik. Namun, Presiden justru menggelar jumpa pers saat berada di Jeddah, Arab Saudi, hanya untuk merespons kondisi partainya. Setiba di Tanah Air, SBY bukannya menyampaikan hasil lawatannya, tetapi malah

“Presiden terlihat kepiikan banget dengan isu Partai Demokrat. Presiden justru tidak menyuarakan isu-isu penting untuk kepentingan bilateral.”

EVA KUSUMA SUNDARI
Anggota BAKN DPR

mempertontonkan kegaduhan politik di partainya. “Bukannya menyampaikan pertanggungjawaban ke publik, Presiden malah terjebak pada persoalan partai sendiri. Di sana berdoa juga buat partainya. Kasihan rakyat ini, masak Presiden hanya mengurus partai sendiri saja,” ungkapnya.

Menurut Uchok, jika SBY memang tidak menghendaki

Anas Urbaningrum menjabat sebagai ketua umum DPP Par-

tai Demokrat, seharusnya SBY menunjuk delegasinya dari pengurus partai. Tidak dengan terjun langsung yang seolah-olah menjadikan kisruh Demokrat sebagai masalah bangsa.

Terpisah, Sekjen DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jilau Parandy mengatakan, sikap Presiden soal kemelut Demokrat dan status hukum Anas Urbaningrum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pemberanahan bahwa Presiden lebih mementingkan urusan politiknya ketimbang masalah bangsa. “Bisa kita bayangkan apa jadinya bangsa ini jika Presiden memainkan peran yang tidak seimbang antara Presiden sebagai kepala negara dan sebagai ketua Dewan Pembina Demokrat. Pernyataan SBY bisa dimaknai sedang memanfaatkan kekuasaan untuk menekan lembaga hukum demi kepentingan politiknya,” katanya.

Sekjen Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ahmad Basarah juga angkat bicara. Dia menilai di tahun politik ini rakyat seperti ini kehilangan pemimpin. Hal ini dikarenakan Presiden SBY lebih sibuk mengurus partainya. “Hal ini menjadi keprihatinan. Urusan partainya saja tidak bisa selesai, apalagi mengurus negara?” ujarnya.

• rahmat sahid/
ayu rachma ningtyas